

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pluralitas agama yang hidup di Indonesia, termasuk didalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada dalam tubuh intern umat beragama merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun.¹ Tidak diingkari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural dalam berbagai aspeknya: etnis, bahasa, budaya dan agama.² Oleh karena itu, usaha untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi hal penting yang harus diupayakan secara terus menerus.³

Sebagaimana juga diketahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya, adat istiadat, bahasa, dan suku bahkan agama. Kemajemukan bangsa Indonesia ini telah melahirkan perpaduan yang sangat indah dalam berbagai bentuk budaya, adat istiadat, bahasa, suku dan agama yang hidup berdampingan dan memiliki komunikasi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Bangsa Indonesia yang berada dan hidup serta berkembang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normatifivitas Atau Historitas.?*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 1996, hlm 5

²Departemen Agama RI, *Penelitian Agama dan Kemasyarakatan; Konflik Dan Kebijakan Kerukunan*, Jakarta, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008, hlm xi

³M.Yusuf Asry (Editor), *Gerakan Dakwah Islam dalam Prespektif Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hlm 69

Undang Dasar 1945, seluruh umat beragama dan komponen bangsa Indonesia dalam keanekaragaman budaya, adat istiadat, bahasa, suku dan agama hendaknya selalu saling menghormati, menghargai dan saling bertenggang rasa untuk senantiasa menjunjung tinggi ke-Bhinneka Tunggal Ika sebagai karuni Tuhan Yang Maha Esa.

Seluruh umat beragama dan komponen bangsa Indonesia harus senantiasa terpancang dan berkewajiban serta mengedepan gotong royong untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta terus memelihara dan mengembangkan kerukunan nasional demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selama Indonesia tetap sebagai sebuah bangsa dan negara, Indonesia akan terus dihadapkan pada realitas akan membangun tatanan masyarakat yang multikultural dan multiagama. Kesadaran akan ke-Bhinneka Tunggal Ika inilah yang membuat para pendiri bangsa Indonesia tidak menjadikan satu kultur ataupun agama dominan yang menaungi semua agama yang ada.

Sejak awal kesadaran bahwa bangsa ini harus didirikan di atas keanekaragaman telah tertanam dalam benak para pendiri bangsa dan diwujudkan dalam azas dan landasan negara kita yakni Pancasila dan juga dituangkan dalam dasar negara yakni Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sebagai penerus para pendiri bangsa sudah semestinya, warga Indonesia saat ini semakin siap belajar menerima dan menghormati satu sama lain, berkerjasama dan membangun

kerukunan. Tidaklah dapat disangkal kiranya bahwa setiap warga negara Indonesia wajib membina hidup rukun, terutama hidup rukun beragama.⁴

Namun harus diakui dengan jujur bahwa sampai saat ini bangsa Indonesia belum mampu maksimal dalam memanfaatkan keanekaragaman dengan baik. Keanekaragaman ini seringkali belum dihayati sebagai suatu kekayaan aset bangsa Indonesia, justru menjadi sumber perpecahan bangsa Indonesia.

Konflik yang terus menerus terjadi ketika pemahaman akan keagamaan saling dipertentangkan, kadang berwujud dalam bentuk tindakan anarkis dan radikal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rudy Harisyah Alam dalam penelitiannya yang berjudul “*Agama dan Kekerasan*” yang menyatakan bahwa:

Selama lebih dari satu dekade berbagai insiden kekerasan terkait dengan isu-isu keagamaan telah terjadi di Indonesia. Bentuk dan modusnya pun bervariasi. Mulai dari kerusuhan atau amuk massa yang berdampak pada korban jiwa dan kerusakan properti milik kelompok keagamaan pada 1995-1997, kampanye anti dukun santet pada 1998, bentrok antar komunitas Muslim dan Kristen di berbagai wilayah di Maluku dan Sulawesi tengah pada 1999-2001, yang berkelanjutan hingga 2003, serangan teror berupa pengeboman yang menimpa berbagai gereja di 10 kota besar di Indonesia pada akhir tahun 2000 dan pengeboman dengan berbagai sasaran warga asing pada 2002-2005, serta berbagai kekerasan sektarian yang menimpa kelompok atau aliran keagamaan yang dipandang sesat seperti Ahmadiyah pada 2005.⁵

Sejak digulirkannya era reformasi pada tahun 1998, bangsa Indonesia tampaknya belum berhasil melepaskan diri dari pola-pola kekerasan yang

⁴Martin Sardy, *Agama Multidimensional; Kerukunan Hidup Beragama Dan Integritas Nasional*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm V

⁵Departemen Agama RI, *Penelitian Agama dan Masyarakat...*, hlm vii

mengganggu kohesifitas kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶ Kondisi beragama rakyat Indonesia sejak pasca krisis 1997 sangat memperhatikan. Konflik bernuansa agama terjadi di beberapa daerah seperti Ambon, Poso dan daerah lainnya.

Konflik tersebut sangat mungkin terjadi karena kondisi rakyat Indonesia yang multi etnis, multi budaya dan multi agama. Belum lagi kondisi masyarakat yang mudah terprovokasi oleh pihak ketiga yang merusak watak bangsa Indonesia yang suka damai dan rukun.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya “*Benarkah Reformasi Melahirkan Perang Agama*” menyatakan bahwa agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat dilumpuhkan dengan cepat, maka dikembangkan konflik agama akan lebih mudah menumbuhkan perpecahan.⁷ Dalam buku ini menjelaskan bahwa konflik agama ataupun konflik yang bernuansa agama tidak terlepas dari faktor eksternal selain memang ada faktor internal.

Akan tetapi, patut disadari bahwa sering kali bukan faktor ekstern yang lebih berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan faktor intern yang berasal dari umat beragama itu sendiri.⁸ Dengan demikian pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama yang benar merupakan usaha utama untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Guna menumbuhkan kesadaran akan

⁶Departemen Agama RI, *Penelitian Agama dan Kemasyarakatan...*, hlm 421

⁷Ahmad Mansur Suryanegara, *Benarkah Reformasi Melahirkan Perang Agama*, Jakarta, Al-Ishlahy Press, 1999, hlm 27

⁸Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, Jakarta, Predana Media Group, 2011, hlm5-6

persatuan dan kesatuan bangsa dengan terwujudnya kerukunan hidup umat beragama.

Pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama yang benar dalam memahami dan menyikapi kehidupan bangsa yang pluralitas; dari negarawan, tokoh-tokoh politik, agama, budaya, pemuda dan dari seluruh komponen bangsa Indonesia, amatlah penting bagi kelangsungan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

Adanya perbedaan agama dan aliran keagamaan yang ada mengandung potensi terjadinya konflik dalam kaitannya dengan hubungan antara umat beragama. Penyebab timbulnya kerawanan hubungan antar umat beragama bersumber dari beberapa faktor antara lain :

(1).Sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah/misi seperti Islam, Kristen dan Budha (2).Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan orang lain (3).Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan apa dan toleransi dalam kehidupan masyarakat (4).Kecurigaan masing-masing pihak akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah, (5).Perbedaan yang cukup mencolok dalam status sosial, ekonomi, dan pendidikan antara berbagai golongan agama (6).Kurangnya komunikasi pemimpin masing-masing umat beragama dan (7).Kecendrungan fanatisme yang berlebihan yang mendorong munculnya sikap kurang menghormati bahkan memandang rendah orang lain.⁹

Terjadinya konflik agama tidak semata-mata disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kumpulan dari berbagai faktor. Latar belakang penyebabnya

⁹Nasir Tamara dan Saiful Anwar Hashem, “*Agama dan Dialog Antar Peradaban*“ dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (Editor), *Agama dan Dilaog Antar Peradaban*, Jakarta, Paramadina, 1996, hlm.xiii.

cukup kompleks, sehingga sulit untuk diketahui secara tepat, faktor mana yang paling dominan.¹⁰ Berbagai penyebab konflik agama atau yang bernuansa agama yang telah dijelaskan diawal, sebenarnya telah dibangun suatu landasan teoritik oleh Mukti Ali. Dalam buku Achmad Syahid dan Zainudin Daulay yang berjudul “*Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*” menyatakan:

Sejarah mencatat bahwa Mukti Ali telah membangun landasan teoritik kerukunan di Indonesia dengan memajukan konsep *agree in disagreement*; karena masalah agama adalah hal yang “khas” dan karenanya, tidak dapat diperjanjikan. Akhirnya ditangan Mukti Ali, konsep “Kerukunan Hidup Umat Beragama” yang muncul pertama dari K.H. Mohammad Dachlaan¹¹ menjadi regulasi yang jelas dan terarah.¹²

Selanjutnya landasan teoritik ini berkembang dari masa ke masa, hingga ada beberapa peraturan perundang-undangan kerukunan hidup umat beragama yang terhimpun dalam buku “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*” dalam pendahuluan buku ini dijelaskan bahwa:

Keaneka-ragaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama tersebut merupakan suatu kenyataan yang harus kita syukuri sebagai kekayaan bangsa. Namun disamping itu kemajemukan atau keaneka-ragaman juga dapat mengundang kerawanan-kerawanan yang dapat memunculkan konflik-konflik kepentingan antar kelompok yang berbeda-beda tersebut. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama dan untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

¹⁰Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 282

¹¹Achmad Syahid dan Zainudin Daulay (editor), *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm xiii-xiv

¹²Istilah “*Kerukunan Hidup Umat Beragama*” muncul secara formal untuk kali pertama dari kata sambutan menteri agama K.H Mohammad Dachlan pada Musyawarah Antar Umat Beragama I, 30 November 1967 di Jakarta. Lihat Sudjangi (peny.), *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama: 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1995/1996). Dalam Achmad Syahid dan Zainudin Daulay (editor), *Riuh di Beranda Satu...*, hlm xxvi

Diantara upaya tersebut adalah pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, melalui peraturan perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama.¹³

Berbagai dialog pun telah dilakukan sebagai upaya dalam membangun kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa dengan terwujudnya kerukunan hidup umat beragama. Dialog antar pemeluk agama di Indonesia sudah pernah dilaksanakan mulai tahun 1969. Dialog ini diprakarsai oleh pemerintah dan dihadiri oleh pemimpin agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.¹⁴

Demikian pula, upaya yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)¹⁵ dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Trilogi jati diri HMI yang merupakan organisasi mahasiswa, organisasi kader dan organisasi perjuangan telah memberi aspirasi terhadap semangat alumni-alumninya yang berada dan berkarya dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang pluralitas.¹⁶ pola pemikiran yang dikembangkan oleh para alumni HMI tentu saja tidak terlepas dari berbagai gagasan dan pola pemikiran keagamaan yang pernah didapat dalam HMI.

Pola pemikiran keagamaan HMI dapat bersumber dari Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI merupakan manifestasi dari

¹³Departemen Komunikasi dan Informatika RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta, Badan Informasi Publik Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, 2005, hlm 5

¹⁴Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Bandung, Mirzan, 1992, Hlm 83

¹⁵HMI berdiri di Yogyakarta pada tanggal 05 Februari 1947, sedangkan lahirnya HMI digagasi oleh mahasiswa, Lafran Pane yang ketika itu baru tingkat satu Sekolah Tinggi Islam (Universitas Islam Indonesia sekarang). Lihat Suharsono, *HMI; Pemikiran Dan Masa Depan*, Yogyakarta, CIIS Press, 1997, hlm 14

¹⁶Victor Tanja, *Himpunan Mahasiswa Islam; Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm 9

tujuan dan pandangan HMI terhadap nilai-nilai dasar ajaran Islam. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI merupakan materi pokok disetiap jenjang training HMI, karena secara konstitusi organisasi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI sebagai identitas dan ruh para kader HMI dalam perjuangannya.

Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI merupakan serangkaian nilai-nilai Islam bertumpu pada pokok ajaran Al-Qur'an dan hadist yang menjadi pokok perjuangan dan motivasi serta gerak langkah sekaligus tolak ukur perjuangan HMI.¹⁷ Diantara nilai-nilai tersebut antara lain ialah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai kemasyarakatan dan nilai keadilan.

Dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan dijelaskan bahwa kecintaan manusia kepada Tuhan sebagai kebaikan, keindahan dan kebenaran yang mutlak dengan sendirinya memancar dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan alam dan masyarakat, berupa usaha-usaha yang nyata guna menciptakan sesuatu yang membawa kebaikan, keindahan dan kebenaran bagi sesama manusia.

Berkaitan dengan nilai kemanusiaan, dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI dijelaskan bahwa Manusia sejati (insan kamil) diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran. Dia menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan menyatakan dalam hidup berperadaban dan berkebudayaan. Dia adalah aktif, kreatif dan kaya akan kebijaksanaan. Dia berpengalaman luas, berpikir bebas, berpandangan lapang dan

¹⁷Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, *Hasil-Hasil Kongres XXVIII Himpunan Mahasiswa Islam, Tema: HMI Untuk Indonesia Satu Tak Terbagi*, Jakarta, PB HMI, 2013, hlm 163

terbuka, bersedia mengikuti kebenaran dari manapun datangnya. Dia adalah manusia toleran dalam arti kata yang benar, penahan amarah dan pemaaf. Keutamaan itu merupakan kekayaan manusia yang menjadi milik daripada pribadi-pribadi yang senantiasa berkembang dan selamanya tumbuh kearah yang lebih baik.

Selain sebagai individualitas, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan baik tanpa berada ditengah sesamanya dalam bentuk-bentuk hubungan tertentu. Dan selanjutnya untuk menegakkan keadilan dalam hubungan manusia pada masyarakat, maka pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan tersebut.

Pada kesimpulan dan penutup Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI pada poin 4 diutarakan bahwa persyaratan bagi berhasilnya perjuangan adalah adanya barisan yang merupakan bangunan yang kokoh kuat. Mereka terikat satu sama lain oleh persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dan oleh sikap yang tegas kepada musuh-musuh dari kemanusiaan. Tetapi justru demi kemanusiaan mereka adalah manusia yang toleran. Sekalipun mengikuti jalan yang benar, mereka tidak memaksakan kepada orang lain atau golongan lain.

Dari beberapa nilai-nilai yang diutarakan diawal, dapat diketahui bahwa Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI memiliki kesesuaian dengan arah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang

pluralitas, maka perlu suatu kesadaran bersama dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

Namun demikian, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dan lebih mendalam. Sehingga diharapkan dengan memahami secara mendalam dan menyeluruh terhadap Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI, nantinya mampu menjelaskan peranan HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Guna mampu memahami Aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

Oleh karena itu, Maka perlu diadakan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang sebenarnya dan nantinya diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagaimana di sampaikan diawal, lewat skripsi yang diberi Judul **PERANAN HMI DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Analisis Terhadap Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI)**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul di atas, maka fokus masalah yang hendak peneliti kaji dalam skripsi ini adalah mengetahui Peranan HMI dalam Mewujudkan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia (Analisis Terhadap Nilai-Nilai Perjuangan HMI). Oleh karena itu ada dua komponen besar yang dijadikan pembahasan di sini, yaitu :

1. Bagaimana peranan HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.?
2. Aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.?

C. Batasan Masalah

Agar tidak ada salah pemahaman, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini dan juga apa maksud dari penulis dalam skripsi ini. Fokus masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana Peranan HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia yang dapat diketahui melalui suatu analisis terhadap Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI.

Maksud penulis pada judul peranan HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia yaitu peranan dalam artian upaya yang dilakukan oleh kader dan alumni HMI dalam bentuk pemikiran untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Fokus dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia

2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang terdapat dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

b. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi pengembangan pendidikan dan keilmuan di UIN Raden Fatah Palembang dan masyarakat pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk merumuskan kebijaksanaan dalam pelaksanaan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian serupa selanjutnya.
4. Bagi penulis secara pribadi sungguh sangat berguna. Karena merupakan bentuk pengembangan wawasan dalam ilmu keagamaan. Serta merupakan pengalaman pertama kali dalam menyusun skripsi yang merupakan bentuk karya ilmiah yang diujikan dan merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya telah ada penelitian yang meneliti Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI. Diantaranya skripsi Muhammad Mansur mahasiswa Ushuluddin UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perbandingan Agama tahun 1981. Judul skripsi *“Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Asas dan Sikap Perjuangannya.”* Dalam skripsi ini membahas Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI sebagai salah satu bentuk pemikiran HMI tentang keislaman. Berbeda dari maksud penulis dalam penelitian ini yang fokus pada bagaimana peranan HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia yang dapat diketahui melalui suatu analisis terhadap Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI.

Skripsi Sastra Sumbawa Putra Utama mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2009 yang berjudul *“Pengaruh Pemahaman Pada Nilai-Nilai Dasar Perjuangan Terhadap Tingkat Kepedulian Sosial Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palembang.”* Fokus pembahasan skripsi ini adalah pengaruh pemahaman Nilai-Nilai Dasar Perjuangan terhadap tingkat kepedulian sosial yang objek penelitiannya anggota HMI cabang Palembang.

Skripsi lain yang membahas tentang Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI yaitu Muhammad Binawan mahasiswa Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat tahun 2011 yang berjudul *“Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi Dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI”* Skripsi ini hanya fokus pada bagian Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI bab 6 tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi yang diteliti terkait dengan penafsiran terhadap ayat-ayat yang terdapat pada bab 6 Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI.

Skripsi lain juga yang membahas tentang Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI yakni Azmiansyah mahasiswa jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Pemikiran Nurcholish Madjid: Studi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI.*” Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu pemikiran Nurcholish Madjid yang dituangkan pada Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI dalam prespektif sejarah pembentukan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI. Dari masa-masa Nurcholish Madjid menulis Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI pada tahun 1966-1971.

Dengan beberapa tinjauan pustaka yang diuraikan diawal, maka penulis mengasumsikan hasil-hasil penelitian di atas sama sekali belum membahas sebagaimana maksud penulis dalam penelitian ini. Berbeda dari beberapa penelitian yang ada, yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian yang fokus pada bagaimana Peranan HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia yang dapat diketahui melalui suatu analisa terhadap Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI.

F. Defenisi Operasional

Agar pengertian judul skripsi “Peranan HMI dalam Mewujudkan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia” tidak menyimpang dari makna yang dikehendaki, maka di sini perlu dijelaskan istilah pada judul yang telah diangkat penulis.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diuraikan bahwa peran adalah pemain; lakon, yang dimainkan. Dan Beperan adalah bermain sebagai; bertindak sebagai. Sedangkan Peranan sendiri adalah bagian yang dimainkan seseorang atau sekelompok orang pemain; tindakan yang dilakukan oleh seseorang sekelompok orang dalam suatu peristiwa.¹⁸ Berdasarkan pengertian peranan ini, dapat dipahami bahwa peranan merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang dihadapkan pada status orang tersebut yang diembannya dalam suatu peristiwa tertentu.

Pengertian wujud dalam Kamus Lengkap Indonesia adalah ujud: segala yang tampak.¹⁹ Sedangkan pengertian mewujudkan adalah 1.menjadikan wujud (benar-benar ada dan sebagainya); 2.menyatakan; melaksanakan (perbuatan, cita-cita, dan sebagainya); 3.menerangkan (memperlihatkan) dengan benda yang konkret. Memahami apa yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian mewujudkan adalah suatu usaha dalam proses untuk menjadikan sesuatu cita-cita benar-benar tercapai.

Istilah kerukunan hidup umat beragama muncul secara formal untuk kali pertama dari kata sambutan menteri agama K.H Mohammad Dachlan pada Musyawarah Antar Umat Beragama I, 30 November 1967 di Jakarta.²⁰ Dari kata sambutan tersebutlah istilah kerukunan hidup umat beragama mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai peraturan perundang-undangan

¹⁸Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Agung Media Mulia, hlm 471

¹⁹Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...* hlm 621

²⁰Achmad Syahid dan Zainudin Daulay (editor), *Riuh di Beranda Satu...*, hlm xxvi

seperti Garis Besar Haluan Negara (BGHN), Keputusan Presiden, dan Keputusan-Keputusan Menteri Agama.

Kata kerukunan dari kata rukun yang berasal dari bahasa arab, *rukun* jamaknya *arkan* berarti asas atau dasar, misalnya; rukun Islam, asas Islam atau dasar agama Islam.²¹ Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia rukun (kata benda) berarti sendi, asas, dasar; sesuatu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sahnya sesuatu amalan. Rukun (kata sifat) berarti tidak berseteru, baik dan damai, dapat berdampingan dan damai; bersatu hati, bersepakat.²² Sedangkan arti kata kerukunan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yakni berarti rasa rukun, kesepakatan, kekompakan.²³

Jadi, kerukunan hidup umat beragama berarti hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antara umat dalam satu agama.

Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI merupakan manifestasi dari tujuan dan pandangan HMI terhadap nilai-nilai dasar ajaran Islam. Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI merupakan serangkaian nilai-nilai Islam bertumpu pada pokok ajaran al-Qur'an dan Hadist yang menjadi pokok perjuangan dan motivasi serta gerak langkah sekaligus tolak ukur perjuangan HMI.²⁴

²¹Departemen Komunikasi dan Informatika RI, *Himpunan Peraturan...*, hlm 6

²²Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...* hlm 524

²³Ibid

²⁴Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, *Hasil-Hasil Kongres XXVIII...*, hlm 149

Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI merupakan dasar cara berpikir, tolak ukur dan terpolanya jalan pemikiran keislaman HMI dibangun dalam rangka menjadikan Islam yang *rahmah lil alamin*. Sehingga Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI bagaikan “ruh” dari jasad HMI untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan *fil ard*.²⁵

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah, yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.²⁶ Karena penelitian ini seluruhnya berdasarkan atas kajian pustaka atau literer, maka penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan, majalah sejarah serta kisah-kisah.²⁷

b. Sumber Data

1. Sumber data primer

²⁵Azhari Akmal Tarigan, *Jalan Ketiga Pemikiran HMI; Menembus Batas Antara Fundamentalisme Dan Liberalisme*, Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2008, hlm ix

²⁶Tim Revisi Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi, *Pedoman Penulisan Makalah & Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang*, 2011, hlm 6

²⁷Mardialis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hlm 28

Data primer adalah data pokok dalam penelitian ini. Sumber data primer tersebut ialah naskah Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI yang terdapat pada buku “*Hasil-Hasil Kongres XXVIII Himpunan Mahasiswa Islam, dengan tema: HMI Untuk Indonesia Satu Tak Terbagi*” di Jakarta Timur-Depok-Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret sampai dengan 15 April 2013 halaman 164-179 yang diterbitkan oleh Pengurus Besar HMI.

2. Sumber data sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama.²⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *Library Research*. *Library Research* adalah penelitian dengan cara menelaah dokumen-dokumen, buku-buku, dan referensi lainnya yang ada hubungannya dan erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

d. Teknis Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul. Supaya data yang didapat mudah dipahami peneliti dan dapat dipahami maksud sebagai temuan yang dirasakan pembaca. Analisis data dalam

²⁸M. Sitorus, *Sosiologi*, Jakarta, Erlangga, 2000, hlm 81

penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data kepustakaan tanpa diikuti dengan uji empirik. Jadi, studi pustaka di sini adalah studi teks yang seluruh substansinya diolah secara filosofis dan teoritis.²⁹ Selanjutnya, peneliti menggunakan metode deskriptif yakni menggambarkan apa adanya. Karena penelitian ini memakai pendekatan yaitu kualitatif, maka disebut dengan deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran dalam skripsi ini secara singkat serta tercapainya penulisan secara sistematis, maka perlu penulis ketengahkan masalah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB *Pertama* pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB *Kedua* menjelaskan tentang HMI dan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI yang terdiri dari sejarah singkat berdirinya HMI, sejarah Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI, kedudukan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI dalam tubuh HMI, dan terakhir hubungan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI dengan misi HMI.

BAB *Ketiga* membahas tentang tinjauan umum tentang kerukunan hidup umat beragama di Indonesia yang terdiri dari pengertian kerukunan hidup umat

²⁹Noeng Muhadjir, *Metode Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996, hlm 158-159

beragama, kerukunan hidup umat beragama di Indonesia, dan kebijakan pemerintah tentang kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

BAB *Keempat* adalah menjelaskan tentang peran strategis HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia yang terdiri dari peranan HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dan aspek-aspek yang terdapat dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

BAB *kelima* adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini.